

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

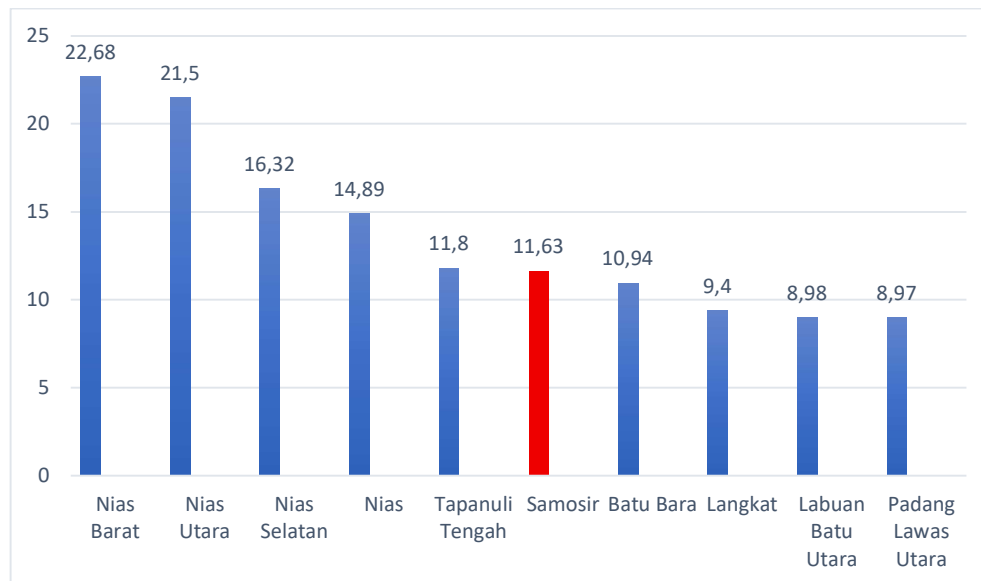
Kemiskinan adalah salah satu masalah besar yang dihadapi dalam pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Masalah ini sangat serius karena menyebabkan berbagai dampak negatif dan berpengaruh besar terhadap negara, terutama menghambat pertumbuhan ekonomi (Hutabarat et al., 2023). Kemiskinan tidak hanya menunjukkan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan kesulitan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat dan memperlambat keberhasilan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan berbagai studi, kemiskinan bersifat multidimensi dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, serta kualitas sumber daya manusia (Rahmawati et al., 2022).

Selain itu, kemiskinan di Indonesia saat ini tergolong tinggi. Maka dari itu, pemerintah biasanya memberikan perhatian dan prioritas tinggi untuk menangani masalah kemiskinan. Permasalahan ini tidak hanya mencakup rendahnya pendapatan, tetapi juga akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi. Untuk mengatasi kemiskinan, dibutuhkan upaya yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari pembangunan manusia, kebijakan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor ekonomi yang produktif.

Dalam konteks makro, tren kemiskinan di Indonesia sejak 2015 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan ketidakstabilan kondisi ekonomi, terutama akibat wabah pandemi Covid-19.

Di tingkat daerah, provinsi Sumatera Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang cukup rumit. Perbedaan tingkat pembangunan antar kabupaten dan kota, perbedaan jenis perekonomian, serta ketidaktepatan kualitas tenaga kerja menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa daerah yang masih tergantung pada sektor pertanian dengan hasil produksi yang rendah biasanya mempunyai tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada daerah dengan jenis perekonomian yang lebih beragam (Rahmawati et al., 2022). Dilihat dari situasi di Sumatera Utara, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin dengan Tingkat tertinggi di provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Gambar 1. 1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2024



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Dengan tingkat kemiskinan 11,63 persen, Kabupaten Samosir berada di urutan keenam tertinggi di Sumatera Utara pada tahun 2024, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias Barat sebesar 22,68 persen, diikuti oleh Kabupaten Nias Utara sebesar 21,5 persen, Kabupaten Nias Selatan sebesar 16,32 persen, dan Kabupaten Nias Utara sebesar 21,5 persen, dan Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 8,97 persen, angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya.

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Samosir menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih menjadi kendala dalam proses pembangunan wilayah. Kondisi ini menarik untuk dipelajari karena Kabupaten Samosir adalah salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Sumatera Utara yang memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam bidang pariwisata, tetapi potensi ini belum sepenuhnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai upah minimum, rata-rata lama sekolah, dan jumlah kunjungan wisatawan yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir.

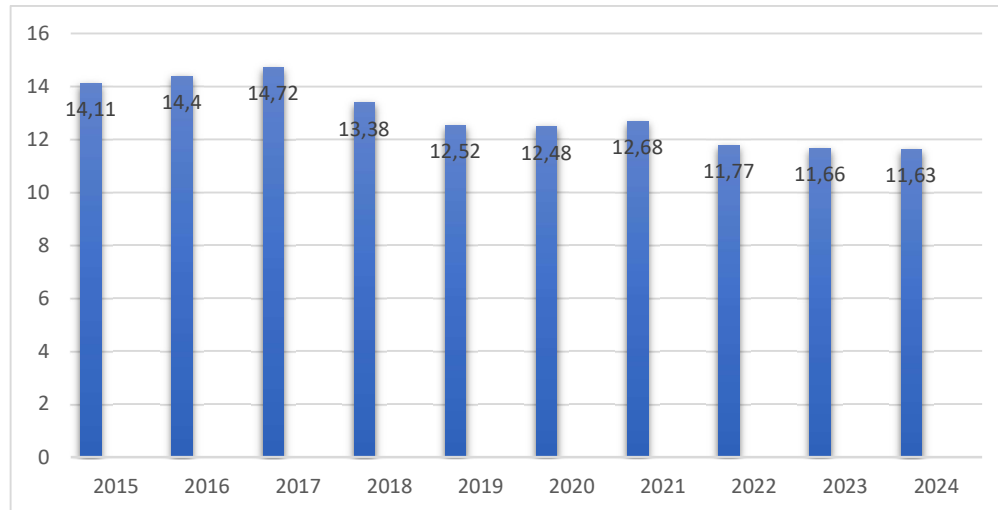
Kemiskinan adalah kondisi yang dipengaruhi oleh macam-macam faktor yang saling terkait di suatu wilayah. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut secara lebih lengkap, perlu dilihat tentang perkembangan aktivitas ekonomi yang mungkin memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong dinamika ekonomi daerah ialah sektor pariwisata, yang dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada jumlah kunjungan wisatawan sebagai variabel yang dapat menggambarkan pergerakan ekonomi daerah.

Kabupaten Samosir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki ciri khas dalam bidang geografis dan ekonomi. Sebagai daerah

kepulauan yang terletak di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir memiliki potensi besar di bidang pariwisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah setempat. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas nasional. Secara teori, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan mampu memajukan pertumbuhan ekonomi lokal, memunculkan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan warga setempat (Simorangkir et al., 2024).

Namun sayangnya meskipun Kabupaten Samosir terkenal dengan pesonanya sebagai destinasi wisata yang menarik minat wisatawan dalam negeri maupun luar negeri di kawasan Danau Toba, kondisi sosial-ekonomi di sana menunjukkan tantangan yang cukup berat. Dari data persentase yang dikeluarkan oleh BPS Sumatera Utara penduduk miskin di Sumatera Utara, Kabupaten Samosir memiliki angka kemiskinan sekitar 11,66%, yang menjadikannya berada di posisi ke-6 dari 33 kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan kemiskinan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pariwisata di Samosir cukup besar, hal tersebut belum secara langsung mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat setempat.

Gambar 1. 2 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Samosir 2015 - 2024



Sumber : BPS Samosir, 2025 (diolah)

Pada grafik tersebut secara umum, tingkat kemiskinan Samosir berada di atas rata-rata Sumatera Utara, sehingga menegaskan perlunya analisis lebih mendalam pada tingkat kabupaten. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Samosir mencapai 14,11% pada tahun 2015 dan meningkat hingga 14,72% pada tahun 2017. Setelah tahun 2017, tren penurunan perlahan mulai terlihat, di mana angka kemiskinan menurun hingga 12,52% pada 2019. Namun, pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata Samosir sehingga angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 12,68% pada tahun 2021.

Hal menariknya adalah pasca pandemi, Samosir menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 11,77% dan kembali menurun menjadi 11,63% pada 2024. Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional yang berada pada level 9,03%, serta lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang sudah berada di bawah 8% pada tahun 2024. Tingginya angka kemiskinan di Samosir diduga berkaitan dengan masih dominannya pekerjaan informal, rendahnya kualitas

pendidikan, kurangnya lapangan kerja formal, dan ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata yang sangat sensitif terhadap perubahan eksternal. Kondisi geografis yang berupa kepulauan di tengah Danau Toba juga menjadi faktor pembatas dalam distribusi barang, akses pendidikan, dan mobilitas tenaga kerja.

Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai masalah karena pendapatan rendah, tetapi sebagai suatu fenomena dalam pembangunan yang dipengaruhi oleh macam-macam faktor ekonomi dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Samosir, sangat tergantung pada perkembangan sektor ekonomi, kualitas tenaga kerja, serta kebijakan terkait pekerjaan. Karena itu, penelitian yang menganalisis pengaruh jumlah pengunjung wisata, Rata-rata Lama Sekolah, dan Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang berperan dalam mengurangi kemiskinan secara lebih luas. Karena itu, kemiskinan di Kabupaten Samosir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Tingkat pendidikan yang rendah, yang bisa dilihat dari Rata-rata lama sekolah, serta keterbatasan kebijakan upah minimum terhadap sektor informal, kemungkinan besar turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Maka dari itu, penting melakukan analisis yang menghubungkan kemiskinan dengan jumlah kunjungan wisatawan, Rata-rata Lama sekolah, dan Upah Minimum agar bisa memahami lebih jelas hal-hal yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Samosir.

Pertumbuhan pariwisata biasanya diukur berdasarkan jumlah pengunjung karena indikator ini langsung menunjukkan bagaimana aktifnya sektor wisata di suatu tempat. Jika jumlah pengunjung meningkat, maka bisa dilihat bahwa daerah

tersebut cukup menarik dan mampu memberikan pengalaman yang baik bagi para tamu. Secara ekonomi, semakin banyak pengunjung akan meningkatkan kebutuhan pada berbagai bidang seperti transportasi, tempat menginap, makanan, kerajinan, dan layanan lokal. Aktivitas ekonomi yang meningkat juga membuka kesempatan bisnis baru serta meningkatkan penghasilan warga setempat. Dalam pembangunan daerah, sektor pariwisata dianggap sebagai salah satu penggerak utama karena membutuhkan banyak tenaga kerja. Karena itu, pertumbuhan pariwisata sering dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, jumlah pengunjung wisatawan menjadi faktor penting dalam menilai dampaknya terhadap penurunan kemiskinan.

Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat penting bagi Kabupaten Samosir. Sebagai bagian dari kawasan Danau Toba yang diakui sebagai *UNESCO Global Geopark*, Samosir memiliki potensi besar dalam bidang wisata alam dan budaya. Tidak hanya menarik kunjungan wisatawan, pariwisata juga ikut memberi dampak ekonomi yang besar, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, memajukan pertumbuhan UMKM, dan menciptakan banyak lapangan kerja di bidang perhotelan, transportasi, kuliner, dan layanan lainnya. Karena itu, perkembangan pariwisata sering digunakan sebagai salah satu tanda pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih lagi di wilayah yang bergantung pada sektor jasa dan alam seperti Samosir.

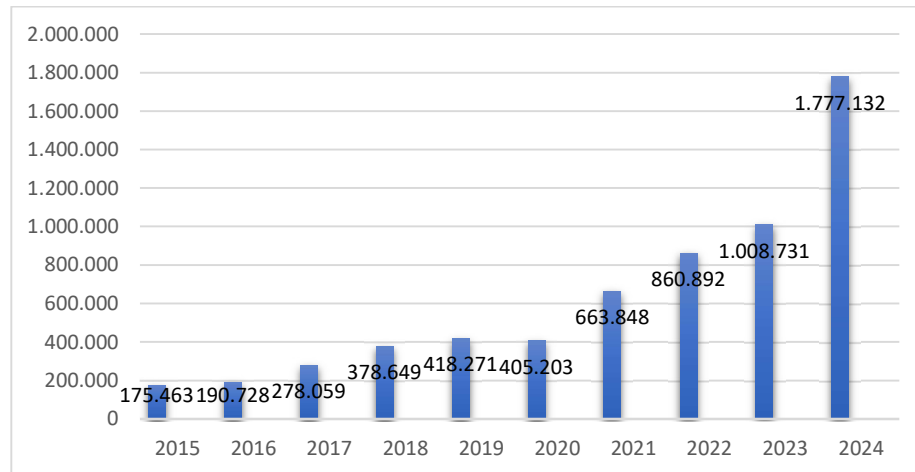
Penelitian menunjukkan bahwa naiknya jumlah wisatawan tidak selalu membuat tingkat kemiskinan turun. Di beberapa tempat, keuntungan dari bisnis pariwisata lebih banyak dirasakan oleh kalangan tertentu saja, bukan tersebar ke seluruh masyarakat, terutama bagi yang memiliki penghasilan rendah. Hal ini

menyebabkan meskipun jumlah wisatawan meningkat, kemiskinan pun tidak selalu berkurang secara signifikan (Simorangkir et al., 2024). Hal ini juga terjadi di Kabupaten Samosir, di mana meningkatnya kunjungan wisatawan belum sepenuhnya membuat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Saat ini, meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peluang kerja dan usaha, terutama di bidang informal dan jasa pariwisata. Secara teori, semakin tinggi aktivitas pariwisata, maka semakin tinggi juga dampaknya terhadap perekonomian daerah, yang berpotensi mengurangi angka kemiskinan. Namun, di lapangan, peningkatan jumlah wisatawan tidak selalu berarti penurunan kemiskinan yang signifikan. Hal ini bisa terjadi jika manfaat ekonomi dari pariwisata hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat yang berpenghasilan rendah belum bisa terlibat secara maksimal dalam perekonomian pariwisata.

Oleh karena itu, menggunakan jumlah kunjungan wisatawan sebagai variabel dalam penelitian ini penting untuk mengetahui secara nyata apakah peningkatan aktivitas pariwisata di Kabupaten Samosir benar-benar membantu mengurangi kemiskinan. Analisis ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pariwisata bisa menjadi alat pembangunan yang inklusif, dan juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pariwisata yang tidak hanya fokus pada naiknya jumlah pengunjung, tetapi juga pada penyebaran manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Gambar 1. 3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing & Nusantara ke Kabupaten Samosir 2015 - 2024



Sumber :BPS Kabupaten Samosir, 2025 (diolah)

Grafik menunjukkan pertumbuhan pariwisata yang sangat signifikan, terutama setelah masa pandemi. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan masih sekitar 175 ribu wisatawan dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai lebih dari 418 ribu pada 2019. Tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat pembatasan mobilitas selama pandemi, namun pada 2021 tren kunjungan kembali pulih dan melonjak tajam. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2023 dan terutama 2024, ketika jumlah wisatawan mencapai 1,77 juta kunjungan.

Lonjakan jumlah wisatawan menunjukkan bahwa pariwisata Samosir semakin diminati, baik karena promosi destinasi Danau Toba maupun perbaikan fasilitas pendukung wisata. Pertumbuhan sektor pariwisata ini berpotensi memberi peluang besar bagi meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, meskipun kunjungan wisatawan meningkat, hal ini tidak otomatis mengurangi kemiskinan jika manfaat ekonominya tidak merata atau terpusat pada kalangan tertentu. Oleh karena itu,

pertumbuhan sektor pariwisata harus diiringi dengan kebijakan yang memastikan manfaatnya tersebar merata dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir yang terus meningkat yang berarti pariwisata memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Jumlah pengunjung yang meningkat meningkatkan aktivitas ekonomi di bidang pariwisata, yang juga berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini disebabkan oleh berbagai sektornya, termasuk transportasi, jasa akomodasi, perdagangan, dan UMKM, yang merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi regional.

Naiknya jumlah wisatawan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan melalui dua cara utama, yaitu meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, seperti hotel, restoran, transportasi, kerajinan, dan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) yang melayani wisatawan. Selain itu, pertumbuhan ini juga membuka peluang kerja baru, baik kerja formal seperti pegawai hotel dan pemandu wisata maupun kerja informal seperti pedagang makanan, penyewa perahu, dan penjual souvenir.

Ketika pariwisata berkembang dan permintaan atas barang atau jasa lokal meningkat, pendapatan masyarakat akan meningkat pula. Hal ini bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan khususnya bagi masyarakat yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sumber penghasilan. Dengan kata lain, meningkatnya kunjungan wisatawan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian lokal, yang akhirnya berkontribusi pada penurunan jumlah orang miskin.

Pada penelitian di Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa jumlah wisatawan dalam negeri dan luar negeri berdampak negatif terhadap tingkat

kemiskinan.

Artinya, semakin banyak wisatawan datang, semakin turun kemiskinan di daerah tersebut. Dampak ini terjadi karena kunjungan wisatawan mendorong kegiatan ekonomi lokal seperti permintaan jasa transportasi, makanan, serta jasa lainnya. Akhirnya, hal ini memunculkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menaikkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan alat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan mengurangi kemiskinan (Ac & Rahmawati, 2021).

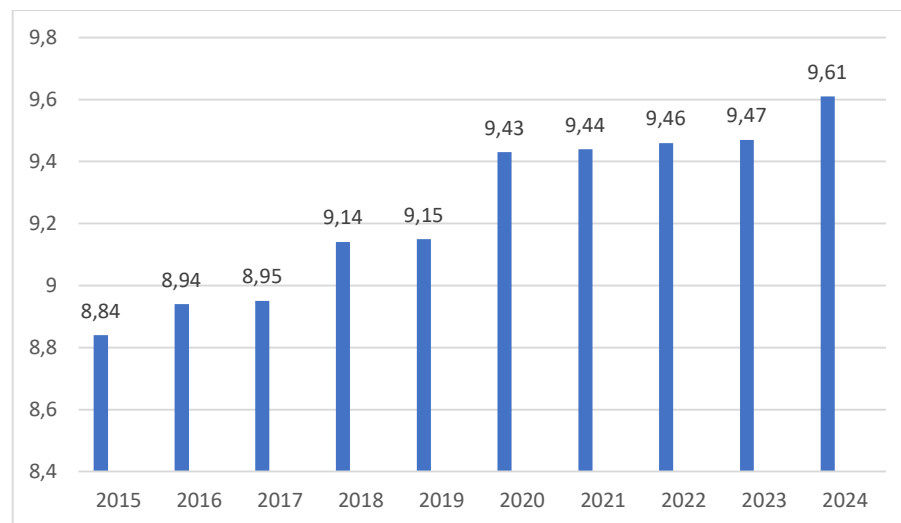
Studi dari beberapa negara ASEAN menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang datang memiliki dampak baik dan penting terhadap perubahan tingkat kemiskinan dalam jangka waktu yang lama. Artinya, jika makin banyak wisatawan yang datang berkunjung, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga bisa dilihat di tingkat regional (UNWTO, 2013).

Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada kelancaran perekonomian daerah, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek sosial masyarakat. Pertumbuhan sektor pariwisata berpotensi menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Perubahan-perubahan yang terjadi kemudian berdampak langsung pada kualitas hidup penduduk, yang dapat diukur melalui indikator-indikator seperti tingkat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan standar kehidupan yang lebih layak.

Disisi lain, tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah adalah salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kualitas tersebut. Ini mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh orang-orang di suatu wilayah. Kualitas sumber daya manusia yang lebih baik terkait dengan lama sekolah rata-rata. Pada akhirnya, ini dapat mengarah pada peningkatan produktivitas dan peluang kerja.

Tingginya rata-rata lama sekolah memperlihatkan semakin baiknya kualitas tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat menaikkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi salah satu hal penting yang diduga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Gambar 1. 4 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Samosir 2015 - 2024



Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Samosir untuk rentang waktu 2015 hingga 2024 memperlihatkan pola peningkatan yang jelas. Di tahun 2015, durasi pendidikan tercatat sebesar 8,84 tahun, lalu mengalami peningkatan bertahap

hingga mencapai 9,61 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Namun demikian, rata-rata lama pendidikan di Kabupaten Samosir masih berada di bawah sasaran program pendidikan wajib selama 12 tahun. Ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan di kalangan masyarakat belum mencapai potensi maksimal. Situasi ini dapat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Kemampuan setiap orang untuk memperoleh sumber daya keuangan terkait erat dengan rata-rata lama sekolah, yang merupakan faktor penting dalam penelitian ini. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menaikkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang berarti lebih banyak kesempatan kerja dan lebih banyak uang. Di sisi lain, tingkat pendidikan yang rendah dapat meningkatkan risiko kemiskinan dan membatasi kesempatan kerja.

Selain itu, lama sekolah rata-rata juga mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Namun, meskipun rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan, ini menunjukkan kalau kualitas SDM masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, variabel yang relevan untuk dievaluasi dalam kaitannya dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir adalah lama sekolah rata-rata.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara lama sekolah rata-rata dan tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Faritz & Soejoto, (2018) menemukan bahwa lama sekolah rata-rata berdampak negatif terhadap

kemiskinan, yang berarti bahwa meningkatkan pendidikan dapat mengurangi kemiskinan.

Upah Minimum adalah salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi pekerja agar mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Penentuan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, produktivitas tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Dalam hal pembangunan daerah, kebijakan upah minimum memiliki peran penting karena langsung memengaruhi pendapatan pekerja, daya beli masyarakat, serta kesejahteraan rumah tangga.

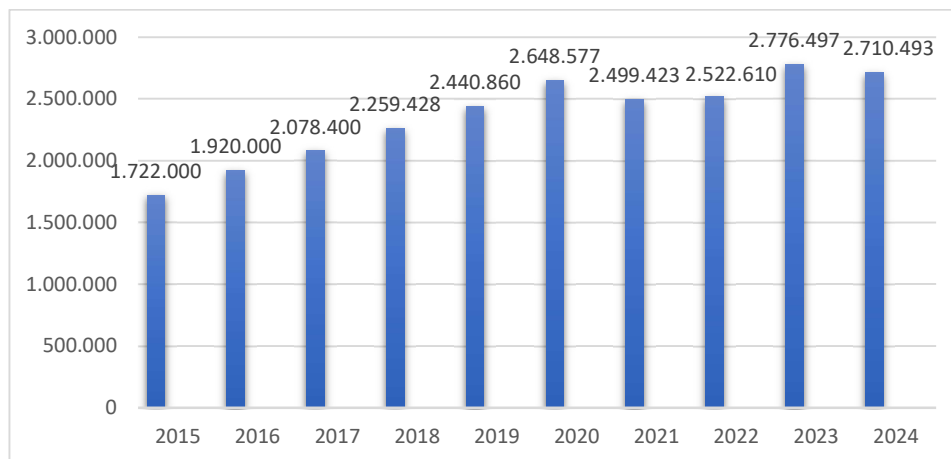
Kebijakan upah minimum melalui Upah Minimum adalah alat kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan pekerja dan memastikan standar hidup minimum. Secara teori, peningkatan upah minimum diharapkan bisa meningkatkan kemampuan beli dan mengurangi jumlah orang miskin. Namun, hasil penelitian nyata menunjukkan bahwa dampak upah minimum terhadap kemiskinan beragam dan sangat bergantung pada struktur pasar tenaga kerja di suatu wilayah (Febrianti & Utami, 2024).

Beberapa penelitian menemukan bahwa kebijakan upah minimum belum cukup berhasil dalam mengurangi kemiskinan, terutama di daerah di mana kebanyakan pekerja bekerja di sektor informal. Hal ini menyebabkan manfaat dari naiknya upah minimum hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat yang bekerja di sektor formal (Tria Resmana & Gunawan, 2025). Kabupaten Samosir memiliki struktur tenaga kerja yang kebanyakan masih didominasi oleh sektor informal dan pertanian tradisional, sehingga berpotensi mengalami situasi yang serupa.

Di Kabupaten Samosir, kebijakan upah minimum memiliki ciri khas. Tidak semua kabupaten/kota di Indonesia menetapkan UMK setiap tahun. Dalam beberapa periode, Kabupaten Samosir menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara sebagai dasar upah minimum yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan struktur ekonomi daerah dan dominasi sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah. Oleh karena itu, perkembangan upah minimum di Samosir menjadi variabel penting yang perlu dianalisis, khususnya dalam hal kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan konteks tersebut, grafik berikut digunakan untuk menunjukkan perkembangan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Samosir selama masa penelitian. Data ini digunakan untuk melihat apakah perubahan kebijakan upah minimum berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan atau justru menunjukkan bahwa kebijakan upah memiliki batasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. 5 Upah Minimum Kabupaten Samosir 2015 - 2024



Sumber : BPS Kabupaten Samosir, 2025 (diolah)

Grafik Upah Minimum Kabupaten Samosir tahun 2015–2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan upah minimum yang cukup konsisten, meskipun

terdapat beberapa fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2015, upah minimum berada pada kisaran Rp1.722.000, kemudian meningkat secara bertahap menjadi Rp1.920.000 pada 2016 dan Rp2.078.400 pada 2017. Tren kenaikan ini berlanjut hingga mencapai Rp2.259.428 pada 2018 dan Rp2.440.860 pada 2019. Puncak kenaikan sebelum pandemi terlihat pada tahun 2020 dengan nilai Rp2.648.577.

Memasuki periode 2021, terjadi penurunan nilai upah minimum menjadi Rp2.499.423, yang mencerminkan dampak penyesuaian kebijakan pengupahan nasional serta kondisi ekonomi karena pandemi COVID-19. Di tahun 2022 upah minimum kembali meningkat menjadi Rp2.522.610, kemudian naik signifikan pada 2023 menjadi Rp2.776.497, sebelum kembali mengalami penurunan relatif pada 2024 menjadi Rp2.710.493. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun upah minimum di Samosir cenderung meningkat dalam jangka panjang, namun pergerakannya tidak selalu stabil dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro serta kebijakan pengupahan yang berlaku.

Upah minimum sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan karena menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga yang bekerja. Dengan meningkatnya upah minimum, diharapkan masyarakat bisa membeli lebih banyak barang dan kebutuhan pokok, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi kemiskinan. Di Kabupaten Samosir, tren kenaikan upah minimum dari tahun 2015 sampai 2020 menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja meskipun biaya hidup terus meningkat.

Namun, mulai tahun 2021 sampai 2024, ada fluktuasi dalam kenaikan upah minimum. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah tidak selalu sesuai dengan

kebutuhan ekonomi masyarakat. Jika upah minimum turun atau tidak naik secara signifikan, maka keluarga berpenghasilan rendah sulit memenuhi kebutuhan pokok, terutama ketika harga barang naik. Kondisi ini bisa membuat kemiskinan tetap berlangsung meskipun sektor lain seperti pariwisata mengalami pertumbuhan.

Selain itu, dampak upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Samosir juga bergantung pada jenis pekerjaan masyarakat. Banyak orang bekerja di sektor informal maupun jasa pariwisata yang tidak seluruhnya mematuhi aturan upah minimum. Akibatnya, kenaikan upah tidak merata dan tidak dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok miskin. Hal ini menyebabkan hubungan antara upah minimum dan kemiskinan tidak selalu jelas, sehingga perlu dianalisis lebih dalam secara kuantitatif.

Di Kabupaten Samosir, kebijakan upah minimum memiliki dinamika tertentu. Pada beberapa tahun, kabupaten ini memiliki UMK sendiri, namun pada tahun berikutnya mengikuti UMP provinsi Sumatera Utara. Tren kenaikan upah minimum secara tahunan menunjukkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan upah dengan kenaikan biaya hidup. Namun, di lapangan, tingkat kemiskinan di Samosir masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum belum secara signifikan mampu mengurangi angka kemiskinan.

Kondisi ini mungkin terjadi karena struktur pekerjaan di Kabupaten Samosir yang masih didominasi oleh sektor informal, seperti pertanian dan usaha kecil, yang sebagian besar tidak langsung diperhitungkan dalam kebijakan upah minimum. Selain itu, jumlah pekerjaan formal yang terbatas membuat manfaat dari kenaikan upah minimum hanya dirasakan oleh sebagian kecil penduduk. Karena itu, penting untuk mengecek secara nyata apakah upah minimum benar-benar mempengaruhi

tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir. Berdasarkan penjelasan tersebut, dibuat hipotesis bahwa upah minimum mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir.

Aktivitas ekonomi daerah, kebijakan upah, dan kualitas sumber daya manusia sangat berkorelasi satu sama lain dalam upaya menurunkan kemiskinan. Wisatawan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, kualitas pendidikan, yang tercermin dari lama sekolah rata-rata, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat, dan upah minimum memengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja.

Keterkaitan antara ketiga elemen tersebut menunjukkan bahwa beberapa faktor yang berperan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah peningkatan aktivitas ekonomi, perbaikan kebijakan upah, dan peningkatan kualitas pendidikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara dukungan aktivitas ekonomi dan kebijakan upah yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar mereka.

Berdasarkan gambaran tersebut, terlihat adanya perbedaan antara teori pembangunan ekonomi dan situasi nyata di Kabupaten Samosir. Tingkat kunjungan wisatawan yang meningkat, rata-rata lama sekolah, serta kenaikan upah minimum secara teori diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan, namun nyatanya kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup besar. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara nyata pengaruh jumlah wisatawan, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten

Samosir. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pengembangan studi ekonomi pembangunan serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir?
2. Apakah Rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir?
4. Apakah jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata lama sekolah dan upah minimum berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh beberapa faktor sosial dan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir.
2. Untuk menganalisis pengaruh Rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir.
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir.

4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata lama sekolah dan upah minimum secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini memakai data sekunder berupa data time series dengan periode pengamatan tahun 2015 hingga 2024. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir, sedangkan variabel independennya meliputi jumlah kunjungan wisatawan sebagai indikator aktivitas pariwisata, IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia, serta UMK sebagai representasi kebijakan upah minimum. Pembahasan penelitian difokuskan pada keterkaitan antarvariabel tersebut secara kuantitatif, tanpa membahas faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti, seperti bantuan sosial atau faktor demografis lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penulisan penelitian ini, selain membawa manfaat bagi penulis dalam memahami topik kajian ekonomi, penelitian ini juga dapat memberikan dampak yang berguna bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Samosir, khususnya melalui pengembangan sektor pariwisata,

peningkatan kualitas pembangunan manusia, dan kebijakan penetapan upah minimum.

- b. Bagi pemangku kepentingan dan pihak terkait, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran empiris tentang dampak jumlah kunjungan wisatawan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta upah minimum terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di daerah yang berbasis pariwisata, serta berfungsi sebagai sumber informasi berbasis data untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam membantu penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif, terkoordinasi, serta berfokus pada penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Samosir.